



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

---

Judul	: Dana Kemiskinan Untuk Rapat : BPK, Lakukan Audit
Tanggal	: Selasa, 31 Januari 2023
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

## Dana Kemiskinan Untuk Rapat BPK, Lakukan Audit

ANGGOTA Komisi VII DPR Sartono Hutomo menyoroti anggaran pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga yang mencapai Rp 500 triliun untuk studi banding dan rapat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta menindaklanjutinya.

“Lakukan audit secara menyeluruh agar ketahuan di simpul-simpul mana anggaran kemiskinan dipakai untuk kegiatan rapat dan studi banding semata,” tegas Sartono dalam keterangannya, kemarin.

Sartono bilang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas yang melontarkan soal anggaran tersebut. MenpanRB mengkonfirmasi soal data kemiskinan di era Pemerintahan Jokowi yang terus meningkat saat ini benar adanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang. Artinya, pernyataan Menpan-RB *inline* dengan data BPS tersebut di atas.

Lebih lanjut, Sartono mendedak MenpanRB menjelaskan detail maksud pernyataannya itu.

Dia heran, karena yang punya otoritas menyampaikan soal

anggaran seharusnya kementerian yang *concern* mengelola keuangan.

“Mestinya Kemenkeu yang punya data soal itu. Logikanya agak sedikit nggak nyambung kalau dilihat dari sisi tugas pokok dan fungsinya (tupok-siny),” ucap Sartono.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai, anggaran penanganan kemiskinan di sejumlah kementerian atau lembaga banyak terbuang sia-sia.

Selama ini, belanja sosial belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak.

“Belanja sosial kita belum bisa mendongkrak masyarakat dari miskin, masih terkesan memelihara orang miskin,” kritik Marwan.

Kondisi itu, kata Marwan, ditambah dengan kementerian/lembaga yang sibuk rapat dengan menghabiskan anggaran besar. Padahal, anggaran besar itu lebih baik diberikan kepada masyarakat untuk membantu permodalan.

Politikus PKB ini mengatakan, dari puluhan juta masyarakat miskin yang setiap tahun mendapat bantuan sosial (bensos), pasti banyak di antara mereka yang mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup. ■ TIF